

BAB V

PEMBAHASAN

A. Proses dan Tahapan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Srikandi Desa Tunggangri

Proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pengurus BUMDes dan pemerintah Desa Tunggangri sampai saat ini berjalan baik. Semua kegiatan telah direncanakan dengan terstruktur. Proses ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi Desa Tunggangri. Proses pemberdayaan masyarakat Desa Tunggangri mendapatkan respon dari masyarakat dengan antusias dan masyarakat sangat partisipatif dengan kegiatan ini.

Pemberdayaan masyarakat Desa Tunggangri sesuai dengan teori Azis Muslim tentang pemberdayaan merupakan sebuah proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformatif, partisipatif, dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani berbagai persoalan dasar yang dihadapi dan meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan harapan.¹

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh M.Atsil, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat adalah dua konsep yang tidak bisa terpisahkan, yang programnya berasal dari inisiatif masyarakat setempat

¹Azis Muslim, *Metodologi Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal.3

dan mengoptimalkan kerja nyata masyarakat itu sendiri. Upaya pemberdayaan merupakan bantuan transformatif yaitu bantuan yang membuat orang yang menerimanya menjadi berubah kearah yang lebih baik melalui upaya sendiri.²

Proses dan tahapan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi melauai BUMDes Srikandi dilakukan melalui upaya sendiri dengan beberapa proses dan tahapan sebagai berikut :

1. Melakukan penggalian potensi yang ada di desa untuk mendirikan unit usaha

Hadirnya BUMDes merupakan upaya pemerintah untuk menanggulangi masalah perekonomian masyarakat dengan cara memobilisasi pengelolaan aset desa yang bisa mendukung dan membantu usaha kecil masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam UU No.6 tahun 2014 bab 8 pasal 76 dijelaskan bahwa aset desa dapat berupa tanah desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa , mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.

Desa Tunggangri sendiri memiliki potensi desa diantaranya lahan sawah yang luas, pasar desa yang ramai, letak desa yang strategis, sarana prasarana yang lengkap, dan juga sumber daya alam yang banyak. Pengelolaan potensi desa ini akan membuka kesempatan masyarakat untuk mendapat pekerjaan baru. Keberadaan BUMDes diharapkan dapat

² M.Atzil M.A,*Pengembangan.....* hal.45

memobilisasi potensi yang dimiliki desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pengembangan ekonomi yang dilakukan untuk masyarakat ini merupakan upaya peningkatan kondisi pendapatan masyarakat ke arah lebih maju sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sendiri.

Hadirnya BUMDes merupakan implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui mobilisasi potensi desa yang dibentuk langsung sesuai dengan inisiatif masyarakat. Hal ini pengurus BUMDes juga mengambil tindakan yang sesuai peraturan UU No.6 yaitu memberikan kebebasan pada masyarakat untuk berinisiatif dan mengoptimalkan kerja nyatanya sendiri dalam membentuk unit-unit usaha.

2. Didirikanya 4 unit usaha

Unit-unit usaha yang didirikan BUMDes ini juga merupakan sebuah potensi desa yang berhasil ditemukan untuk pengembangan ekonomi masyarakat diantaranya:

- a. Unit usaha pengelolaan retribusi pasar ini didirikan karena mengingat retribusi pasar merupakan unit usaha yang akan memberikan sumbangan pada PAD dengan jumlah besar. Dan hasil dari PAD ini bisa digunakan untuk pembangunan ekonomi, seperti membantu untuk dana pembangunan infrastruktur. Pembangunan struktur juga akan berimbang balik dengan kondisi

ekonomi masyarakat. Karena infrastruktur yang bagus akan memudahkan proses mobilisasi ekonomi masyarakat.

b. Pendirian unit usaha simpan pinjam

Pendirian unit usaha simpan pinjam ini merupakan potensi desa untuk memberdayakan masyarakat yang kekurangan modal. Para pemilik usaha kecil akan diberikan modal tanpa jaminan dengan bagi hasil yang kecil. pinjaman modal ini ditujukan untuk membantu pengembangan ekonomi masyarakat. Masyarakat akan lebih mudah mengembangkan usahanya dengan pinjaman yang diberikan BUMDes. Pengurus BUMDes juga melakukan pendampingan dalam pengembangan usaha masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan pinjaman modal akan dipantau kenaikan sosial ekonominya.

c. Pendirian unit usaha perikanan

Unit usaha perikanan dibentuk karena dianggap perikanan di Desa Tunggangri ini sangat berpotensi. Dimana ketua BUMDes sebagai pengelola unit usaha memang sudah menekuni bidang perikanan sejak awal. Jadi ketika BUMDes mendirikan unit usaha perikanan pengelola pastinya sudah lihai. Unit usaha perikanan dirasa lebih mudah pengelolanya karena tidak terikat waktu dalam mengurusnya. Keuntungan usaha ini juga lumayan besar meskipun membutuhkan waktu panen dalam tempo 10 bulan.

d. Pendirian unit usaha koperasi desa

Koperasi desa ini didirikan untuk membantu pemerintah desa dalam memenuhi kebutuhan kantornya dan juga menyediakan kebutuhan untuk murid paud di balaidesa. Harapannya nanti koperasi desa bisa memiliki gedung sendiri, sehingga proses pengembangannya lebih mudah.

Harapan pendirian unit-unit usaha BUMDes tersebut untuk kemandirian desa agar tidak bergantung dari bantuan negara untuk menuju desa yang mandiri.

3. Melakukan sosialisasi terkait program kerja BUMDes dan perkembangan BUMDes kepada masyarakat disetiap ada pertemuan.

Berdasarkan teori menurut Totok Mardikanto ada beberapa langkah untuk pengembangan ekonomi , langkah-langkah tersebut yaitu³; langkah pertama pelatihan usaha dengan cara mensosialisasikan BUMDes kepada masyarakat dan mengambil simpati kepada masyarakat agar minat berwirausahanya tinggi. Langkah kedua pemagangan atau pengenalan terhadap realitas usaha secara instan. Dari sini pengurus BUMDes mendata usaha-usaha yang dimiliki masyarakat seperti umkm maupun yang sudah memiliki CV.

Kemudian langkah ketiga yaitu penyusunan proposal sebagai acuan dan target untuk pengembangan usaha. Penyusunan proposal ini

³ Totok Mardikanto, *Pemberdayaan.....* Hal.225

memungkinkan terjalin kerjasama dengan berbagai lembaga perekonomian. Langkah keempat yaitu permodalan, langkah ini merupakan faktor penting dalam dunia usaha. Untuk mendapatkan permodalan yang stabil diperlukan kerjasama dengan pihak lembaga keuangan yang disalurkan melalui kemitraan usaha lainnya. langkah empat ini sesuai dengan unit usaha simpan pinjam BUMDes Srikandi yang ditujukan membantu permodalan masyarakat Desa yang memiliki usaha dan butuh modal untuk mengembangkannya. BUMDes Srikandi memberikan kemudahan meminjamkan modal tanpa jaminan dan dengan jumlah bagi hasil sedikit.

Langkah kelima yaitu perluas jaringan bisnis. Sebagai upaya konsistensi kelanjutan usaha, pengurus BUMDes memberikan wadah untuk saling sharing saat rapat keanggotaan. Para pengusaha Desa Tunggangri bisa saling bertukar pikiran mengenai usahanya dan dapat memperoleh relasi baru.

4. Pelatihan pengembangan ekonomi

BUMDes Srikandi pernah mengadakan pelatihan pengurusan SIUP. Strategi ini sangat tepat dilakukan untuk umkm. Mengingat SIUP ini bisa memberikan banyak manfaat diantaranya legalitas usaha, kemudahan untuk mendapatkan modal karena sudah legal, akses untuk mendapatkan pendampingan usaha dari pemerintah, dan terakhir kesempatan untuk

memperoleh pemberdayaan dari pemerintah. Dari beberapa manfaat ini tentunya taraf ekonomi masyarakat akan lebih sejahtera.

5. Merancang strategi strategi baru untuk membuat BUMDes Srikandi tambah maju dan dapat menyumbang PAD Desa Tunggangri.

BUMDes hadir sebagai upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah perekonomian masyarakat dengan cara memobilisasi pengelolaan asset desa serta membantu dan mendukung usaha kecil masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada pasal 77 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa.⁴

Keadaan alam dan perkembangan ekonomi memanglah terus berubah . Keadaan ini membuat ide-ide baru terus bermunculan. Potensi desa yang ada perlu dimobilisasi dengan strategi strategi baru supaya bisa dikelola dengan baik. Hal ini dapat menjadikan usaha lebih produktif dan efektif. Strategi baru terus dilakukan dalam pengembangan ekonomi untuk mengkawal pesatnya kemajuan ekonomi saat ini.

Melalui BUMDes strategi penggalian potensi desa harus terus dilakukan secara optimal. Karena ketika potensi desa dapat dikelola dengan baik harapan desa menjadi sejahtera akan segera tercapai. Apalagi kekayaan

⁴ UU No.6 tahun 2014 tentang desa

alam, adat istiadat, budaya dan sumberdaya manusia di Desa Tunggangri sangatlah melimpah.

Beberapa proses yang telah dilalui masyarakat Desa Tunggangri berikut sesuai dengan teori menurut Edi Suharto yang dikutip oleh Alfitri, pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dilakukan dengan melalui penerapan pendekatan yang disingkat 5P yaitu melalui pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan⁵.

Dimana masyarakat telah dimungkinkan dengan penggalan potensi desa sehingga dapat mengelola aset desa sehingga dapat merasakan manfaatnya untuk pengembangan ekonomi. Pemerintah desa dan pengurus BUMDes juga telah meakukukan penguatan terhadap masyarakat dengan melakukan pelatihan agar kualitas SDM masyarakat siap untuk melakukan progam pemerintah tersebut. Kegiatan BUMDes ini juga telah mendapat perlindungan dari segi hukum sehingga keberadaanya sangatlah legal dan terjamin, dimana diantaanya telah tercantum dalam Undang- Undang No 6 Th 2014.

B. Dampak Positif dan Negatif Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi melalui Badan Usaha Milik Desa Srikandi Desa Tunggangri

Dalam penelitian terdahulu yang ditulis oleh Andriani sari menjelaskan bahwa BUMDes sebagai institusi baru di tingkat desa memiliki peluang dan tantangan . Oleh karena itu tata kelola BUMDes harus disusun sehingga

⁵ Alfitri, "Community Development" Teori dan Aplikasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal.26-27

mampu bersaing dan membantu masyarakat dalam membantu perekonomian mereka. Institusi yang baik memiliki prinsip atau aturan yang mendukung jalannya organisasi dan terdapat bidang pekerjaan yang tercakup dan digambarkan oleh struktur organisasi pendirian BUMDes perlu menyeimbangkan penguatan aturan tata kelola dan regulasi.

Dijelaskan dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa bahwa BUMDes didirikan untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Tunggangri setelah adanya BUMDes Srikandi telah memberikan dampak baik kepada masyarakat Desa Tunggangri. Dengan adanya unit-unit usaha yang didirikan BUMDes seperti unit usaha simpan pinjam, unit usaha perikanan, unit usaha koperasi desa, dan unit usaha pengelolaan retribusi pasar tersebut masyarakat Desa Tunggangri mengalami peningkatan ekonomi yang banyak.

BUMDes dapat menambah PAD Desa Tunggangri. Pengelolaan retribusi pasar semakin bagus dan dapat memberikan fasilitas pada para pedagang, dapat membuka lapangan pekerjaan baru, dan masyarakat yang mendapatkan pinjaman modal telah berhasil diberdayakan.

Dampak positif yang terlihat jelas sesuai dengan tujuan didirikannya BUMDes yaitu dengan kontribusi BUMDes yang dapat menambah PAD Desa Tunggangri. Dimana BUMDes Srikandi telah memberikan penambahan dana

sejumlah Rp 4.000.000 pada tahun 2006, Rp 3.600.000 pada tahun 2017, dan Rp 15.200.000 pada tahun 2018.

Dampak terhadap pengusaha mikro seperti halnya Bu Mukaromah pemilik warung kelontong yang awalnya modal usahanya hanya Rp 4.000.000,00 kemudian mendapat pinjaman modal Rp 2.000.000,00 dapat menambah penghasilannya yang semula perhari mendapatkan untung Rp 40.000,00/hari sekarang beliau mampu mendapatkan keuntungan Rp 60.000,00/hari. Pemberdayaan yang dilakukan pengurus BUMDes dinilai berhasil karena dapat mengembangkan ekonomi masyarakat Desa Tunggangri.

Dampak positif lain yang telah dirasakan masyarakat yaitu terbukanya lapangan pekerjaan baru, masyarakat dapat menikmati manfaat aset desa yang berhasil digali potensinya, masyarakat mendapatkan penguatan kemampuan dengan diberikannya pelatihan. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Ayub, bahwa pengembangan masyarakat adalah upaya untuk mencapai enam tujuan yaitu, 1) untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, 2) meningkatkan kesadaran pengetahuan dan partisipasi masyarakat, 3) meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan, 4) menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk membangun dirinya sendiri, 5) membangun serta memelihara sarana dan prasarana fisik wilayahnya, serta 6) meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.⁶

⁶⁶ Ayub M., *Manajemen*.....hal.131

C. Kendala dan Solusi dalam Melakukan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi melalui Badan Usaha Milik Desa Srikandi Desa Tunggangri

Kendala melakukan strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi melalui BUMDes Srikandi yaitu:

1. Kurangnya modal

Modal merupakan faktor penting dalam dunia usaha. Adanya beberapa potensi dan perbaikan yang perlu dilakukan belum bisa terlaksana karena faktor finansial. BUMDes membutuhkan investor dalam proses pengembangan ini. Keberadaan BUMDes juga perlu perhatian khusus dari pemerintah pusat dalam melakukan pemberdayaan masyarakat untuk menggali potensi desa agar menjadi desa yang mandiri.

2. Membutuhkan waktu

Proses pengembangan ekonomi tidak bisa dilakukan dengan dadakan. Proses pengembangan ekonomi dapat dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan keadaan yang terjadi disekitar. Proses pengembangan BUMDes Srikandi terus dilakukan. Semua keberhasilan akan tercapai setelah kita mau bekerja keras dalam melakukannya. Kemajuan Desa Tunggangri ini butuh waktu untuk melampaui proses pengembangan ini.

3. Kurangnya SDM yang partisipan untuk berjuang mengembangkan BUMDes.

Pengelola BUMDes sebagian memang masyarakat yang telah memiliki profesi lain seperti guru, perangkat desa, dan juga pekerja lain. Hal ini menyebabkan terhambatnya pengembangan BUMDes karena pengelola pekerja paruh waktu sehingga belum ada yang fokus secara maksimal. Dan juga karena karena dalam tahap pertumbuhan BUMDes yang baru dirintis ini pastinya belum bisa memberikan kontribusi besar kepada masyarakat sehingga masyarakat banyak yang loyo untuk berpartisipasi.